PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Brantas Kelurahan Werungotok Nganjuk 64419 Jawa Timur
Telp & Fax. (0358) 321400
email : bpkad@nganjukkab.go.id

Nganjuk, 04 Juli 2025

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
Kab. Nganjuk
di
N G A N J U K

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.7.5/936 /411.402/2025

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Menyampaikan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2025 untuk memenuhi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 000.7.5/1595/411.000/2025 tanggal 30 Juni 2025	1 (satu) set	Dikirimkan dengan hormat untuk menjadikan periksa

Plt. Kepala BPKAD
Kabupaten Nganjuk

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001

Paraf

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Sekretaris	N	
2.	Kasubag	-	-
3.	Analis PE		04/07/25

ARIS P.

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

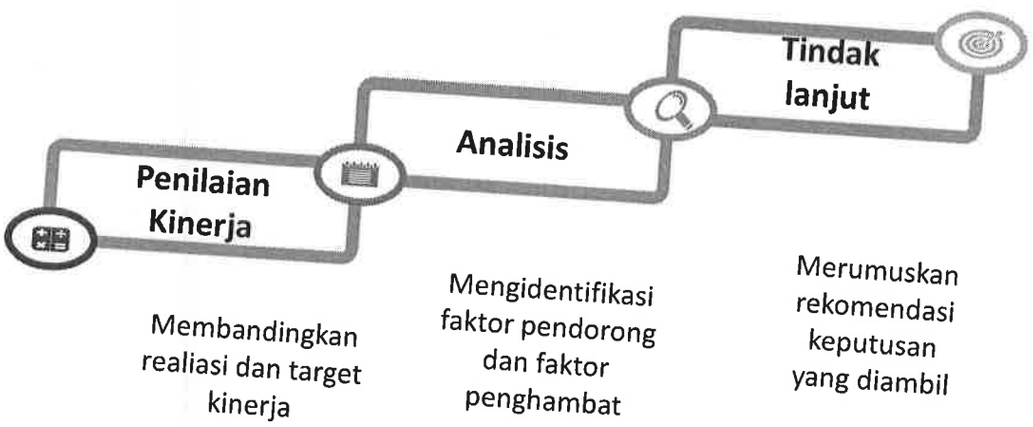
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

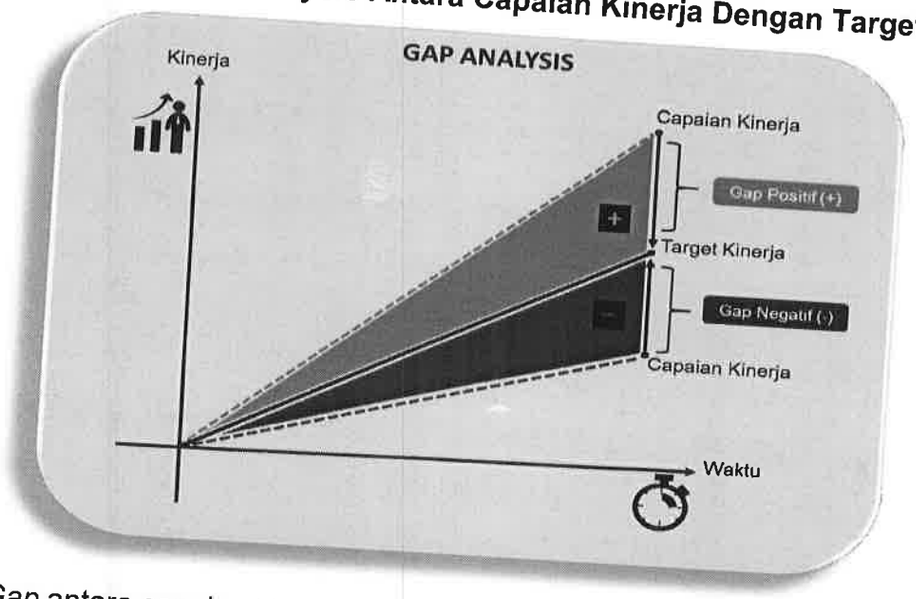
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



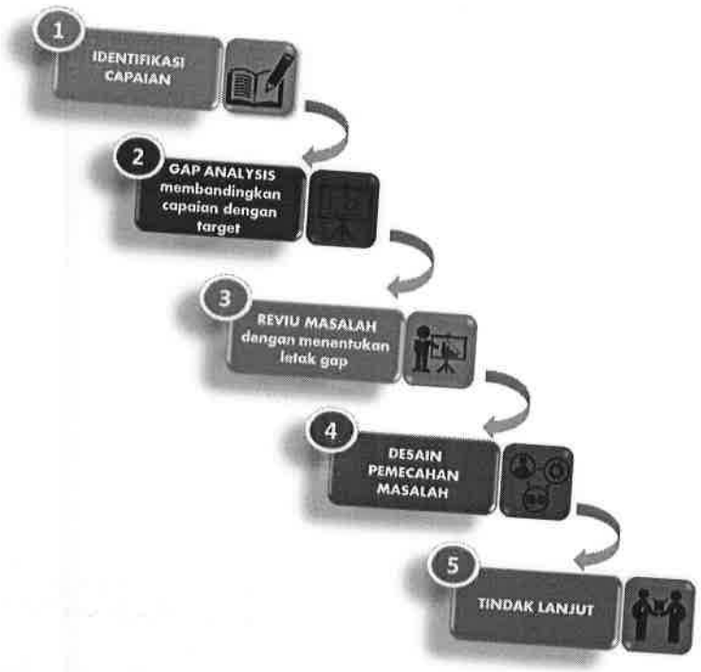
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagainya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini atas audit BPK	WTP	100 %	100 %
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standar	100 %	100%	100%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sebesar 100 % atas tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk dikarenakan proses audit BPK telah diselesaikan yaitu pemenuhan dokumen yang diminta oleh BPK ;
2. Dalam pelaksanaan tujuan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standart baru mencapai 35,17 % pada tribulan II dan dikategorikan masih rendah dikarenakan kegiatan rata – rata baru dimulai di Triwulan II.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**82**	**36%**	**43%**
1	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		**100%**	**31,25%**	**37,86%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	2	40%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	1	25%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	0	0%
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**100%**	**65,63%**	**15,16%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46	38	83%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akkhir tahun SKPD	1	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17	4	24%
3	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		**100%**	**0,00%**	**0,00%**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2	0	0%
4	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**75%**	**0,00%**	**0,00%**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60	0	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150	0	0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150	0	0%
5	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**90%**	**26,09%**	**58,02%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1	1	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1	0	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1	1	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1	1	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3	1	33%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10	2	20%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	10	28%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200	50	25%
6	***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah***		**80%**	**95,00%**	**27,14%**
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang di sediakan	10	11	110%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peraltan dan mesin lainnya yang di sediakan	10	8	80%
7	***Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah***		**90%**	**35,29%**	**14,29%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	0	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	36	9	25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12	9	75%
8	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah***		**84%**	**35,00%**	**29,47%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan	19	5	26%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	10	3	30%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara	10	5	50%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1	1	100%
B	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**100%**	**19%**	**19%**
1	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***		**96%**	**16,67%**	**7,14%**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2	1	50%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah perda APBD dan Perbup penjabaran APBD yang disusun	2	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perda perubahan APBD dan Perbup perubahan penjabaran APBD yang disusun	5	0	0%
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah yang dilaksanakan	208	0	0%
2	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***		**100%**	**18,66%**	**13,88%**
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	9000	1639	18%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208	52	25%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan adana transfer lainnya	92	9	10%
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keunagan bank dan lembaga keuangan bukan bank	1	0	0%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650	157	24%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	5	1	20%
3	***Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah***		**100%**	**0,59%**	**7,14%**
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban	11	0	0%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran	4	0	0%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	1	50%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2	0	0%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	150	0	0%
4	***Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah***		**80%**	**58,33%**	**19,05%**
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6	5	83%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4	2	50%
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota	2	0	0%
5	***Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah***		**80%**	**0,00%**	**0,00%**
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	100	0	0%
C	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**100%**	**51,30%**	**51%**
1	***Pengelolaan Barang Milik Daerah***		**100%**	**51,30%**	**51%**

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	52	30	58%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52	52	100%
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	1	0	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	52	52	100%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) BMD	52	0	0%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	4	2	50%
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah	30	0	0%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD barang milik daerah	26	2	8%

Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

1. Capaian Output Kegiatan pada Program Penunjang Kegiatan Pemerintahan Daerah Tribulan II rata-rata 43,09 %, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah **Sangat Rendah** hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II;
2. Capaian Output Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tribulan I rata-rata 19.02%, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah **Sangat Rendah** hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II;
3. Capaian output Sub Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tribulan I rata-rata 51,33 %, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah **Rendah** hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan rata-rata baru mulai dilaksanakan pada tribulan II.

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	Sinergitas seluruh stakeholder	-
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sinergitas seluruh stakeholder	-

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**	**Faktor Pendorong**	**Faktor Penghambat**
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Adanya ketentuan yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan SP2D dan lainnya kepada OPD sehingga pelayanan tepat waktu	OPD belum melengkapi permohononan sesuai ketentuan sehingga pelayanan SP2D dan lainnya tidak dapat segera ditindaklanjuti

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait		

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Tribulan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini memuat hasil evaluasi kegiatan Bulan April s.d. Juni Tahun 2025. Kebijakan Program maupun kegiatan yang dan dilaksanakan tersebut berpedoman dan bertujuan untuk wujudkan visi dan misi BPKAD Kabupaten Nganjuk. Program dan Kegiatan tersebut mengacu kepada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) BPKAD Kab. Nganjuk Tahun 2024 – 2026. Dalam realisasinya terdapat faktor pendorong dan penghambat. Untuk faktor pendorong akan dipertahankan sebagai dalam proses pencapaian kinerja tribulan berikutnya sedangkan faktor yang menghambat akan menjadi bahan evaluasi sehingga dapat direduksi pada tribulan berikutnya.

IV.2. Tindak Lanjut

Untuk lebih mengoptimalkan evaluasi strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

a. Menghimbau OPD untuk melakukan penelitian dokumen secara mandiri sebelum mengajukan permohonan SP2D dan dokumen lainnya;
b. Menjadikan hasil evaluasi kinerja tribulan berikutnya;
c. Tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Nganjuk, 04 Juli 2025
Plt. Kepala BPKAD
Kabupaten Nganjuk

Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001

Paraf Hierarkis

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris		
2.	Kasubag		
3.	Analis PE		4/07/25

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD

1 Indikator Kinerja : 1)Opini atas audit BPK 2)Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai standart

2 Target Kinerja : 1)WTP 2)100% 3)100%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
								I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1	**Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**		**Keuangan**				**459.288.873.679**			**60.862.248.190**			**83.458.100.943**		**0**			**0**		-		**144.320.349.133**	-					**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP BPKAD**	**82**		**7.951.079.278**	**27,13%**		**792.251.845**			**2.506.103.433**		**0**			**0**		**27,13**	**%**	**3.298.355.278**	**107,13**	**%**	**9.745.183.070**	**127,54**	**36,61**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**54.567.000**	**31,25%**	**%**	**11.289.000**			**9.883.750**		**0**			**0**		**31,25**	**%**	**21.172.750**	**116,25**	**%**	**56.823.907**	**116,25**	**34,71**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	8.185.000	1	dokumen	3.682.000	2	dokumen	174.000							3	dokumen	3.856.000	8	dokumen	12.332.357	53,33	50,22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	7.639.000	-	dokumen	-	1	dokumen	3.458.000							1	dokumen	3.458.000	6	dokumen	7.230.000	200,00	31,54	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	7.639.000	-	dokumen	-	0	dokumen	-							-	dokumen	-	1	dokumen	4.066.800	33,33	17,74	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	5.457.000	-	dokumen	3.735.000	1	dokumen	815.750							1	dokumen	4.550.750	2	dokumen	5.915.750	66,67	36,13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	5.457.000	-	dokumen	-	0	dokumen	-							-	dokumen	-	1	dokumen	3.554.000	33,33	21,71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	laporan	9.276.000	1	laporan	3.872.000	1	laporan	290.000							2	laporan	4.162.000	6	laporan	10.775.500	50,00	38,71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	laporan	10.914.000	3	laporan	-	0	laporan	5.146.000							3	laporan	5.146.000	6	laporan	12.949.500	37,50	39,55	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**100**	**%**	**5.537.703.833**	**68,75%**	**%**	**585.446.205**			**2.160.954.868**		**0**			**0**		**68,75**	**%**	2.746.401.073	**149**	**%**	**7.949.596.276**	**148,75**	**38,57**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46	orang/ bulan	5.524.062.833	39	orang/ bulan	579.345.205	38	orang/ bulan	2.160.119.868							77	orang/ bulan	2.739.465.073	215	orang/ bulan	7.932.879.276	467,39	38,57	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	laporan	7.639.000	1	laporan	6.101.000	0	laporan	545.000							1	laporan	6.646.000	1	laporan	13.524.000	33,33	59,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17	laporan	6.002.000	4	laporan	-	4	laporan	290.000							8	laporan	290.000	20	laporan	3.193.000	39,22	13,88	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
								I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**100**	**%**	**10.831.000**	**50,00%**	**%**	**0**			**1.500.000**		**0**		**0**		**50,00**	**%**	1.500.000	**150**	**%**	**1.500.000**	**150,00**	**6,54**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	laporan	10.831.000	1	laporan	-	0	laporan	1.500.000						1	laporan	1.500.000	3	laporan	1.500.000	50,00	6,54	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**75**	**%**	**448.515.200**	**0,00%**	**%**	**3.960.000**			**6.205.000**		**0**		**0**		**-**	**%**	10.165.000	**80**	**%**	**178.429.000**	**80,00**	**32,58**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60	paket	33.300.000	-	paket	-	0	paket	-						-	paket	-	-	paket	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150	orang	68.932.950	-	orang	3.960.000	0	orang	6.205.000						-	orang	10.165.000	54	orang	13.415.000	12,00	5,86	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150	orang	346.282.250	-	orang	-	0	orang	-						-	orang	-	104	orang	165.014.000	23,11	56,56	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah**	**90**	**%**	**401.317.922**	**26,48%**	**%**	**12.324.444**			**32.760.335**		**0**		**0**		**26,48**	**%**	45.084.779	**52**	**%**	**209.837.475**	**52,48**	**18,79**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	10.218.892	1	paket	-	1	paket	3.539.000						2	paket	3.539.000	4	paket	5.709.835	133,33	29,06	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	paket	3.872.400	1	paket	-	0	paket	-						1	paket	-	2	paket	1.054.870	66,67	6,44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1	paket	121.095.440	1	paket	5.958.404	1	paket	12.142.415						2	paket	18.100.819	3	paket	57.023.964	100,00	20,47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	32.742.000	1	paket	278.052	1	paket	1.228.900						2	paket	1.506.952	3	paket	4.531.752	100,00	4,61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	dokumen	5.400.000	-	dokumen	-	1	dokumen	1.260.000						1	dokumen	1.260.000	3	dokumen	1.260.000	33,33	7,77	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	10	laporan	14.354.240	3	laporan	344.988	2	laporan	1.965.020						5	laporan	2.310.008	12	laporan	5.400.423	40,00	10,99	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	laporan	187.264.000	10	laporan	5.743.000	10	laporan	12.625.000						20	laporan	18.368.000	45	laporan	123.992.631	41,67	21,99	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	200	dokumen	26.370.950	50	dokumen	-	50	dokumen	-						100	dokumen	-	250	dokumen	8.864.000	41,67	18,05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		-	0		-						-		-	-		2.000.000	0,00	7,88	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan**	**80**	**%**	**313.710.773**	**0,00%**	**%**	**0**			**33.173.700**		**0**		**0**		**-**	**%**	33.173.700	**67**	**%**	**457.543.700**	**67,00**	**21,77**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10	unit	27.914.000	-	unit	-	11	unit	27.845.700						11	unit	27.845.700	17	unit	452.215.700	12,88	45,38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	10	unit	285.796.773	-	unit	-	8	unit	5.328.000						8	unit	5.328.000	8	unit	5.328.000	2,32	0,48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**90**	**%**	**727.487.000**	**27,45%**	**%**	**161.442.771**			**165.220.013**		**0**		**0**		**27,45**	**%**	326.662.784	**154**	**%**	**630.369.554**	**171,61**	**59,92**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat menyurat	3	laporan	483.122.000	2	laporan	500.000	0	laporan	507.000						2	laporan	1.007.000	11	laporan	2.868.000	122,22	21,90	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	laporan	4.365.000	9	laporan	47.874.532	9	laporan	46.290.009						18	laporan	94.164.541	45	laporan	242.660.765	41,67	47,50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
								I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	240.000.000	3	laporan	113.068.239	9	laporan	118.423.004							12	laporan	231.491.243	21	laporan	384.840.789	58,33	72,87	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara**	**84**	**%**	**456.946.550**	**13,13%**	**%**	**17.789.425**			**96.405.767**		**0**			**0**		**13,13**	**%**	114.195.192	**129**	**%**	**261.083.158**	**129,13**	**26,07**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	19	unit	132.548.000	5	unit	16.031.925	5	unit	24.766.156							10	unit	40.798.081	29	unit	138.166.903	50,88	38,02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10	unit	10.788.500	-	unit	112.500	3	unit	-							3	unit	112.500	13	unit	4.132.500	43,33	12,75	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10	unit	107.810.050	-	unit	540.000	5	unit	9.868.700							5	unit	10.408.700	13	unit	23.703.700	43,33	7,24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	205.800.000	0	unit	1.105.000	1	unit	61.770.911							1	unit	62.875.911	2	unit	95.080.055	75,00	34,16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah Sesuai Standar**	**100**	**%**	**449.305.244.401**	**8,22%**	**%**	**59.996.200.784**			**80.708.560.122**		**0**			**0**		**8,22**	**%**	140.704.760.906	**93**	**%**	**568.786.805.422**	**93,22**	**35,18**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.02.2.01	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH**	**Presentase Dokumen Anggaran Daerah (APBD dan P.APBD) yang disusun tepat waktu**	**96**	**%**	**1.985.040.044**	**0,91%**	**%**	**149.706.215**			**310.421.993**		**0**			**0**		**0,91**	**%**	460.128.209	**101**	**%**	**1.960.404.009**	**100,91**	**34,67**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	dokumen	444.440.730	-	dokumen	9.286.400	1	dokumen	110.894.906							1	dokumen	120.181.306	3	dokumen	443.521.325	50,00	33,24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2	dokumen	454.999.866	-	dokumen	-	0	dokumen	48.879.020							-	dokumen	48.879.020	2	dokumen	390.993.361	33,33	28,54	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	470.599.897	2	dokumen	113.320.625	0	dokumen	19.420.000							2	dokumen	132.740.625	4	dokumen	523.009.742	66,67	37,22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	5	dokumen	514.999.901	-	dokumen	27.099.190	0	dokumen	131.228.067							-	dokumen	158.327.258	6	dokumen	602.879.581	40,00	39,02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		208	orang	99.999.650	-	orang	-	0	orang	-							-	orang	-	-	orang	-			
		5.02.02.2.02	**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah**	**100**	**%**	**762.239.200**	**10,59%**	**%**	**41.034.640**			**87.809.731**		**0**			**0**		**10,59**	**%**	128.844.371	**159**	**%**	**815.000.649**	**158,59**	**35,63**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	9000	dokumen	364.697.000	797	dokumen	25.303.690	1639	dokumen	79.587.731							2.436	dokumen	104.891.421	11.470	dokumen	433.756.283	42,48	39,64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	208	dokumen	122.579.000	100	dokumen	9.913.000	52	dokumen	3.700.000							152	dokumen	13.613.000	360	dokumen	103.245.650	57,69	28,07	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Aistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi fasilitasi asitensi, sinkronisasi, supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.	92	dokumen	78.810.200	24	dokumen	410.000	9	dokumen	759.000							33	dokumen	1.169.000	202	dokumen	62.210.941	73,19	26,27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
								I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	dokumen	37.874.000	1	dokumen	-	0	dokumen	480.000							1	dokumen	480.000	2	dokumen	29.887.450	66,67	26,30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	650	dokumen	21.659.000	129	dokumen	5.407.950	157	dokumen	345.000							286	dokumen	5.752.950	1.157	dokumen	66.563.075	59,33	102,43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5	dokumen	136.620.000	3	dokumen	-	1	dokumen	2.938.000							4	dokumen	2.938.000	22	dokumen	119.337.250	146,67	29,11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03	**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Disusun**	**100**	**%**	**838.850.000**	**29,59%**	**%**	**87.941.694**			**152.328.129**							**29,59**	**%**	240.269.823	**107**	**%**	**970.892.347**	**106,59**	**38,40**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	11	laporan	81.050.000	-	laporan	-	0	laporan	-							-	laporan	-	11	laporan	81.086.500	33,33	31,87	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4	laporan	96.300.000	1	laporan	-	0	laporan	4.300.000							1	laporan	4.300.000	5	laporan	79.673.000	41,67	27,58	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ngawi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	dokumen	604.100.000	-	dokumen	87.941.694	1	dokumen	146.133.129							1	dokumen	234.074.823	3	dokumen	767.301.157	50,00	42,34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHPH BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			0	-		-	0		-							-		-	1		-	33,33	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2	dokumen	22.500.000	-	dokumen	-	0	dokumen	1.895.000							-	dokumen	1.895.000	2	dokumen	11.651.900	33,33	34,52	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150	orang	34.900.000	49	orang	-	0	orang	-							49	orang	-	199	orang	31.179.790	44,22	29,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.04	**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**80**	**%**	**445.625.039.157**	**0,00%**	**%**	**59.712.299.847**			**80.147.563.493**		**0**			**0**		**-**	**%**	139.859.863.340	**25**	**%**	**564.996.994.340**	**25,00**	**35,18**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6	laporan	400.220.205.808	-	laporan	59.628.549.847	5	laporan	77.299.515.493							5	laporan	136.928.065.340	9	laporan	542.035.240.440	50,00	39,67	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
								I			II			III			IV										
1	2	3	4	5	8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4	laporan	19.413.877.949	-	laporan	83.750.000	2	laporan	2.848.048.000							2	laporan	2.931.798.000	5	laporan	4.946.489.000	41,67	2,56	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota	2	laporan	25.990.955.400	-	laporan	-	0	laporan	-							-	laporan	-	1	laporan	18.015.264.900	16,67	38,50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.05	**Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuanaan daerah**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**80**	**%**	**94.076.000**	**0,00%**	**%**	**5.218.388**			**10.436.776**		**0**			**0**		**-**	**%**	15.655.164	**75**	**%**	**43.514.078**	**75,00**	**15,42**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	100	orang	94.076.000	-	orang	5.218.388	0	orang	10.436.776							-	orang	15.655.164	134	orang	43.514.078	44,67	15,42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar**	**100**	**%**	**2.032.550.000**	**57,99%**	**%**	**73.795.561**			**243.437.388**		**0**			**0**		**57,99**	**%**	317.232.949	**158**	**%**	**1.053.881.787**	**157,99**	**15,79**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.03.2.01	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Terlaksananya penyusunan dokumen pengelolaan barang milik daerah**	**100**	**%**	**2.032.550.000**	**57,99%**	**%**	**73.795.561**			**243.437.388**		**0**			**0**		**57,99**	**%**	317.232.949	**158**	**%**	**1.053.881.787**	**157,99**	**15,79**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	52	dokumen	250.000.000	52	dokumen	11.319.000	30	dokumen	74.750.000							82	dokumen	86.069.000	134	dokumen	120.791.500	85,90	16,11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	52	dokumen	50.000.000	-	dokumen	-	52	dokumen	7.100.000							52	dokumen	7.100.000	104	dokumen	52.667.000	66,67	35,11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	dokumen	100.000.000	-	dokumen	-	0	dokumen	-							-	dokumen	-	1	dokumen	2.081.000	33,33	0,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52	laporan	600.000.000	52	laporan	48.257.195	52	laporan	73.321.892							104	laporan	121.579.087	156	laporan	339.146.949	100,00	28,26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	52	laporan	125.000.000	52	laporan	-	0	laporan	396.000							52	laporan	396.000	104	laporan	51.103.725	200,00	17,03	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	laporan	402.550.000	-	laporan	5.455.798	2	laporan	75.259.996							2	laporan	80.715.794	6	laporan	352.314.260	50,00	14,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	30	laporan	155.000.000	-	laporan	-	0	laporan	-							-	laporan	-	30	laporan	58.979.319	33,33	11,23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	26	dokumen	350.000.000	-	dokumen	8.763.568	2	dokumen	12.609.500							2	dokumen	21.373.068	28	dokumen	76.798.034	35,90	7,31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Meningkatkan Kualitas pengelolaan Keuangan dan aset Daerah																											Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Meningkatnya Kualitas laporan Keuangan																											Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah																											Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
																				54,68				**Rata-rata capaian kinerja**		**74,39**	**27,73**	
																								Predikat		**Rendah**	**Rendah**	

Catatan

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Pendorong Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah Mendapat Dana Transfer dari Pusat sehingga perlu dilakukan proses perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; Faktor Pendorong Sub Kegiatan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait adalah Dengan adanya Kasda online proses penc
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Aplikasi terdapat kendala SIPD yang mengalami gangguan; Lembur proses verifikasi anggaran kas dan penerbitan SPM belum realisasi semua; Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah terdapat kendala Proses KKPD masih terkendali
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Terkait kendala pada sistem SIPD dilakukan koordinasi dengan TIM SIPD Pusdatin Kemendagri. Untuk Kendala terkait KKPD dilakukan koordinasi dengan Bank Mandiri Untuk kendala Aplikasi SIM DTH/RTH tidak diperpanjang kontraknya tindak lanjunya dengan membuat aplikasi mandiri, Untuk Kendala ketergantungan dengan pihak ketiga untuk masalah penilaian BMD (BPN dan KPKNL) dilakukakan koordinasi secara intensif dengan instan
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam RKPD Tahun Berikutnya : Menjadikan hasil evaluasi kinerja tahun 2024 sebagai pedoman di tahun 2025

Kolom 13 Penjumlahan kolom 9+10+11+12 untuk kinerja ada yang tidak diakumulasi